



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PROFESI NOTARIS ATAS
PEMBUATAN AKTA PARTIJ MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH

FITRIANA ERICA

NIM.11427206188

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul: "TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PROFESI NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA PARTIJ MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS", yang ditulis oleh:

Nama : FITRIANA ERICA

NIM : 11427206188

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juli 2021

Pembimbing Skripsi


FIRDAUS. SH.MH

NIP.196610021994031002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PROFESI NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA PARTIJ MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS "**, yang ditulis oleh:

Nama : **FITRIANA ERICA**
NIM : **11427206188**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Rabu, 28 Juli 2021**
Waktu : **08.00 WIB**
Tempat : **Daring / online**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juli 2021

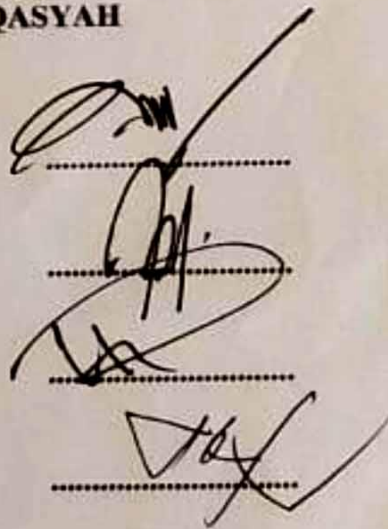
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
Alpi Syarin, SH. MH

Penguji I
Dr. Abu Samah, SH. MH

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH. MH



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005



ABSTRAK

NAMA: FITRIANA ERICA NIM :11427206188

Judul Penelitian ini adalah: “TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PROFESI NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA PARTIJ MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS”.

Akta partij yang dikeluarkan oleh notaris bisa saja menimbulkan akibat hukum dikemudian hari, misalnya dalam akta perjanjian yang disepakati kedua belah pihak yang disahkan oleh notaris ada unsur pemalsuan atau penipuan dari salah satu pihak, yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu tentunya ada dampak hukum bagi notaris sebagai pihak yang telah mengesahkan akta tersebut. Sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan akta partij, maka notaris akan dimintai keterangan atau pertanggungjawaban, apabila dikemudian hari terjadi sengketa atau ada pihak-pihak yang dirugikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana tinjauan yuridis tanggung jawab profesi notaris atas pembuatan akta partij menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dan apa akibat hukum terhadap akta partij yang telah disahkan oleh notaris. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis tanggung jawab profesi notaris atas pembuatan akta partij menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta partij yang telah disahkan oleh notaris.

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta partij menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Sedangkan penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan akta partij sebagaimana dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, tentunya notaris harus bisa memberikan penjelasan dan bertanggung jawab terhadap isi akta partij tersebut di hadapan penegak hukum apabila isi akta tersebut terjadi sengketa dan masuk ke ranah hukum. Akta partij yang disahkan oleh notaris bisa saja berupa keterangan palsu atau ada indikasi penipuan yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu notaris yang bersangkutan harus bisa memberikan penjelasan atau keterangan mengenai hal tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap akta yang dikeluarkan atau disahkan oleh notaris tentunya mempunyai akibat hukum, demikian juga halnya dengan akta partij, yakni akta yang disahkan berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang menghadap kepada notaris, dan dimintakan untuk dibuat aktanya sebagai pegangan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, maka akibat hukum yang timbul dari akta partij, antara lain adalah akta partij mengikat kedua belah, kemudian akta partij bisa menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan akta partij juga bisa sebagai alat bukti dalam proses hukum.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua, Bapak Moh. Erdi dan Ibu Cartarina Yunus Putri yang selalu mendoakan memotivasi dan membantu penulis baik dari segi apapun itu sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Firdaus, SH.MH dan sekaligus pembimbing penulis, serta Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Muslim, SH.MH, dan staf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.

6. Kepada orang terdekat Penulis Ade Syafirman yang memberikan motivasi, dukungan serta doa untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada Adik kandung penulis Diona Erica Putri, yang telah memberikan motivasi dan selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2021

FITRIANA ERICA

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Batasan Masalah 8
- C. Rumusan Masalah..... 8
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 8
- E. Metode Penelitian 9
- F. Sistematika Penulisan 11

BAB II : TINJAUAN UMUM 13

- A. Akta 13
- B. Bentuk Kontrak..... 16
- C. Jenis Akta 18
- D. Majelis Kehormatan Notaris 19

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 22

- A. Notaris 22
- B. Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris 24
- C. Tugas dan Wewenang Notaris 34

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 37

- A. Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Profesi Notaris Atas
Pembuatan Akta Partij Menurut Undang-Undang
Nomor 2..... 37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

B. Akibat Hukum Terhadap Akta Partij yang Telah Disahkan
oleh Notaris 45

BAB V: PENUTUP..... 51

A. Kesimpulan..... 51

B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti mengadakan hubungan dengan manusia yang lain dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Hubungan yang dilakukan tersebut ada yang merupakan hubungan pribadi dan ada pula hubungan dalam bentuk bisnis atau hubungan kontrak atau perjanjian. Untuk mengikat suatu perjanjian atau kesepakatan maka diperlukan jasa notaris untuk memperkuat kesepakatan atau perjanjian tersebut. Demikian juga halnya dengan kepemilikan suatu benda atau barang, terutama barang yang tidak bergerak seperti tanah, gedung dan sebagainya tentunya memerlukan sertifikat yang didapat melalui jasa notaris.

Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu kontrak, perjanjian dan ikatan. Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang maupun lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Pada pasal 1313 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Kontrak adalah sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan yaitu hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih. Perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Dari ketentuan pasal di atas dapat dipahami bahwa, notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan pengesahan terhadap suatu perjanjian, membuat akta dan menyimpan surat-surat yang sudah dileges. Akta atau surat yang disahkan oleh pejabat notaris tersebut merupakan dokumen autentik yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat, yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa, Notaris berwenang membuat akta

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam Pasal 1868 KUH Perdata dijelaskan bahwa, “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa yang berwenang membuat akta autentik adalah Notaris, mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Di samping wewenang di atas, Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta berkaitan dengan pertanahan; dan
- g. Membuat akta risalah lelang.²

Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan notaris dalam dunia bisnis, perdagangan, dan hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, serta hubungan antara perseorangan dengan badan hukum dan sebagainya. Dalam proses hubungan tersebut sudah pasti membutuhkan jasa notaris dalam memperkuat semua hubungan hukum tersebut.

Mendasarkan pada nilai moral dan nilai etika Notaris, maka pengembangan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembanannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.³

Dari pernyataan tersebut, maka notaris dalam mengeluarkan akta harus benar-benar memperhatikan akibat hukum, dan berhati-hati serta cermat dalam menilai segala hubungan hukum yang akan disahkan harus sesuai

² Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

³ Herlien Budiono, 2007, *Notaris dan Kode Etiknya*, (Medan: Ikatan Notaris Indonesia,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Oleh karena itu, maka ada 2 (dua) macam akta notaris, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh notaris (akta relaas atau akta pejabat)

Akta ini disebut juga akta berita acara, yaitu hal-hal yang dibuat oleh dan tidak dijelaskan secara autentik secara keseluruhan mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. misalnya akta berita acara/ risalah rapat-rapat suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain.

2. Akta yang dibuat dihadapan notaris/akta pihak (akta partij)

Akta yang dibuat dihadapan notaris mengenai penjelasan dari apa yang diterangkan atau diberitahukan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya. Dengan pengertian lain bahwa merupakan tindakan hukum sepihak dan perjanjian dibuat dalam bentuk akta pihak (partij).

Kita juga harus mengetahui apa arti dari istilah-istilah yang digunakan dalam akta-akta tersebut, diantaranya ada minuta akta, grosse, salinan akta. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan kepala Akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”.

Akta partij yang dikeluarkan atau yang diberikan oleh notaris tentunya akan menimbulkan akibat hukum dikemudian hari, misalnya dalam akta perjanjian yang telah disahkan oleh notaris tersebut ada tindakan pemalsuan atau penipuan dari salah satu pihak, yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu tentunya ada dampak hukum bagi notaris sebagai pihak yang telah mengesahkan perjanjian atau akta tersebut. Tentunya sebagai pihak yang sudah diberikan legalitas berdasarkan undang-undang sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan akta yang secara hukum memperkuat suatu perbuatan hukum bagi kedua belah pihak atau bagi pihak yang memiliki akta tersebut, akan dimintai penjelasan dan pertanggungjawaban mengenai akta yang telah disahkan tersebut.

Sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan dan membuat akta secara autentik tentunya sudah pasti dimintai keterangan atau pertanggungjawaban, apabila dikemudian hari terjadi sengketa atau ada pihak-pihak yang dirugikan. Tentunya sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan akta partij tersebut akan dimintai penjelasan oleh pihak yang berwenang mengenai histori dari keluarnya akta tersebut.

Suatu permasalahan memang terjadinya di kemudian hari, ketika akta tersebut dibuat memang tidak ada permasalahan, tetapi bisa saja terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan setelah akta tersebut dikeluarkan, sehingga ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu notaris harus benar-benar dapat menilai, memperhatikan, serta meneliti dan berhati-hati dalam mengeluarkan suatu akta, jangan sampai akta yang dikeluarkan tersebut ada permasalahan secara hukum. Misalnya ada penjelasan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang ada unsur pemalsuan atau penipuan, sehingga dapat merugikan pihak lain yang terkait dengan akta tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa, dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Dari ketentuan tersebut, maka Notaris harus benar-benar saksama dan berhati-hati dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, harus bisa menilai dan memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam akta yang disahkan tersebut. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan atau lalai dilakukan maka Notaris yang bersangkutan akan mengalami permasalahan secara hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

Hal ini yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu penelitian, dengan judul: “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Profesi Notaris Atas Pembuatan Akta Partij Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak mengalami penafsiran yang luas, maka penulis membatasi permasalahan yang dibahas yakni yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Notaris, jenis dan kekuatan kata yang dikeluarkan oleh Notaris, serta tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis merumuskan permasalahan yang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis tanggung jawab profesi notaris atas pembuatan akta partij menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?
2. Apa akibat hukum terhadap akta partij yang telah disahkan oleh notaris?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis tanggung jawab profesi notaris atas pembuatan akta partij menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta partij yang telah disahkan oleh notaris.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau.

2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan tanggung jawab Notaris dalam mengesahkan akta.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta partij menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.⁴

Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),h.74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan seperti "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris".
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-buku yang membahas mengenai hukum bisnis, artikel-artikel dan bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian, diantaranya "Pengantar Hukum Bisnis karangan Munir Fuady, Hukum Perdata Indonesia karangan Abdulkadir Muhammad".
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini, diantaranya " Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karangan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio".



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis tentang tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta partij berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara yuridis tentang tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta partij berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli hukum bisnis, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

B. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG AKTA

Bab ini berisi gambaran umum tentang pengertian akta, jenis-jenis akta, dan kekuatan akta.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menggambarkan tentang pengertian notaris, kewenangan notaris, syarat pengangkatan dan pemberhentian notaris, dan akta partij.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari tinjauan yuridis tentang tanggung jawab profesi notaris atas pembuatan akta partij menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, serta akibat hukum terhadap akta partij yang telah disahkan oleh Notaris.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan yang telah diuraikan, serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat berdasarkan hasil penelitian ini.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Akta

Akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk alat pembuktian. Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu.⁵

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa akta terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Bagian awal akta, memuat tentang hal-hal sebagai berikut:
 - a. Judul akta.
 - b. Nomor akta.
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun.
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
2. Bagian badan akta, yang harus dimuat di dalamnya antara lain:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal penghadap dan/atau orang yang mewakili.
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.

⁵Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan.
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
3. Bagian akhir akta, yang merupakan penutup akta memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi.
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.⁶

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami, bahwa suatu akta harus memuat ketiga hal tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu akta, yang dapat menjelaskan isi akta tersebut.

Tugas jabatan Notaris adalah membuat akta otentik. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah “Suatu akta yang dalam

⁶*Ibid*, h.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yakni Pasal 1868 KUH Perdata, bahwa akta dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Berdasarkan pengertian diatas, Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta otentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri. Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, yakni :

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berumur paling sedikit 27 tahun
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Berijazah sarjana hukum dan jenjang strata dua kenotariatan
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berguru-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan dan
7. Tidak memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkapkan dengan jabatan Notaris

Dalam Undang-undang jabatan Notaris, Notaris Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga Notaris wajib bertindak profesional dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Jabatan Notaris yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

B. Bentuk Kontrak

Bentuk kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.⁷

Dari pihak ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa perjanjian yang dibuat notaris atau dimuka notaris merupakan perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau yuridis.

Ada tiga fungsi dari akta notaris (akta autentik), yaitu;

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan adalah sesuai dengan kehendak para pihak.⁸

Sehubungan dengan fungsi akta notaris tersebut diatas, adalah untuk alat bukti ketika suatu perjanjian atau kontrak mengalami suatu masalah, sehingga yang menjadi alat bukti yang autentik adalah akta notaris tersebut.

⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.43

⁸ *Ibid*, h.43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Jenis Akta

Notaris merupakan pihak yang berwenang mengeluarkan akta, yang dapat dipergunakan sebagai legalitas hukum terhadap sesuatu hal. Akta yang dikeluarkan oleh notaris antara lain adalah:

- a. Membuat akta pendirian/anggaran dasar: badan usaha, badan sosial (yayasan), koperasi dan lain-lain, serta mengurus pengesahannya.
- b. Membuat akta-akta perjanjian, misalnya perikatan jual beli tanah, sewa menyewa tanah, hutang-piutang, kerjasama, perjanjian kawin dan lain-lain.
- c. Membuat akta wasiat.
- d. Membuat akta fidusia.
- e. Melegalisir (mengesahkan kecocokan fotocopy surat-surat).
- f. Membuatkan dan mengesahkan (legalisasi) surat-surat di bawah tangan, misalnya surat kuasa, surat pernyataan, dan surat persetujuan.
- g. Membuatkan dan mendaftarkan/menandai surat-surat di bawah tangan dan lain-lain.

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa, Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Akta penawaran pembayaran tunai;
- c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d. Akta kuasa;
- e. Akta keterangan kepemilikan; dan
- f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa, akta yang dikeluarkan oleh notaris jenisnya bermacam-macam sesuai dengan fungsi dari akta tersebut di keluarkan. Ada akta yang sifatnya tetap, seperti akta jual beli, tetapi ada pula akta yang hanya sifatnya insidentil, seperti akta kuasa, hanya berfungsi untuk hal tertentu saja dan dapat dicabut.

D. Majelis Kehormatan Notaris

Dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris disebutkan bahwa, pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah Notaris Ikatan Notaris Indonesia dan/atau Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Pusat.

Tata cara pelaksanaan kode etik, ketentuan-ketentuan mengenai sanksi-sanksi kode etik, dan ketentuan-ketentuan mengenai sanksi-sanksi kode etik, dan ketentuan-ketentuan mengenai eksekusi dari sanksi-sanksi kode etik diatur dalam satu peraturan tersendiri, yang merupakan lampiran dari Kode Etik Notaris.

Notaris dalam melakukan tugasnya melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dengan menghayati keseluruhan martabat jabatannya dan dengan keterampilannya melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya dengan selalu mengindahkan ketentuan undang-undang, etika, ketertiban umum, dan berbahasa Indonesia yang baik.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Unsur-unsur perilaku profesional notaris adalah sebagai berikut:

1. Perilaku profesional harus menunjuk kepada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi.
2. Dalam melakukan tugas profesional harus mempunyai integritas moral, dalam arti segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas-tugas profesionalnya. Sesuatu yang bertentangan dengan yang baik harus dihindarkan walaupun dengan melakukannya, ia akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi. Pertimbangan moral dalam melaksanakan tugas profesi tersebut, harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai sopan santun, dan agama yang berlaku. Tidak penting bahwa seorang hanya memiliki kemampuan profesional adalah seorang yang bermoral.
3. Harus jujur, tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada dirinya sendiri.
4. Sekalipun sebenarnya keahlian seorang tenaga profesional notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesionalnya ia tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Andaikata seseorang mengharapkan bantuannya dan orang itu tidak dapat membayar karena tidak mampu, demi profesionalnya ia harus memberikan jasanya semaksimal mungkin dengan cuma-cuma. Ia tidak boleh bersikap deskriminatif, membedakan antara orang yang mampu dan orang tidak mampu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ia harus memegang teguh etik profesi. Memegang teguh kode etik profesi sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas profesi dengan baik, karena dalam kode etik profesi itulah ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Notaris yang melakukan profesinya di bidang hukum dengan sebaik-baiknya haruslah juga berbahasa Indonesia yang sempurna, sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia dan Nasional. Notaris di dalam dan di luar jabatannya bertata kehidupan yang baik dan menyesuaikan diri dengan norma-norma kebiasaan yang baik di tempat di mana ia bertugas.⁹

Notaris sebagai warga negara Indonesia dan ahli hukum wajib ikut serta meningkatkan penyuluhan hukum yang berguna bagi masyarakat sesuai dengan pembangunan nasional khususnya di bidang hukum. Notaris dilarang mengadakan persaingan tidak sehat dengan jalan merendahkan tarif/ongkos. Dengan demikian, maka notaris harus melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya dan tidak dibenarkan melanggar kode etik yang sudah ditentukan.

⁹Kode Etik Notaris.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta notaris merupakan akta yang dikeluarkan oleh notaris dalam berbagai hal yang berhubungan dengan sertifikat tanah, perjanjian/kontrak dan sebagainya.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang agraria pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di Tempat Notaris diangkat.

Persyaratan tersebut di atas harus dipenuhi oleh seorang notaris, baru dapat diangkat sebagai notaris. Oleh karena itu notaris diangkat berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan dalam undang-undang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris menjelaskan bahwa:

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- e. Sehat rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- f. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau berijazah sarjana hukum dan lulusan pendidikan spesialis notariat yang belum diangkat sebagai notaris pada saat undang-undang jabatan notaris mulai berlaku;
- g. Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun ;
- h. Telah mengikuti pelatihan teknis calon notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan pihak lain;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - j. Tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - k. Mengajukan permohonan pengangkatan menjadi notaris secara tertulis kepada menteri;
 - l. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.
- (2) Permohonan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Fotocopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh notaris;
 - b. Fotokopi buku nikah, akta perkawinan yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh notaris bagi yang sudah menikah;
 - c. Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan yang disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Fotokopi sertifikat pelatihan teknis calon notaris yang disahkan oleh Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- e. Fotokopi akta kelahiran surat kenal lahir yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh notaris;
- f. Fotokopi sertifikat kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang disahkan oleh Notaris;
- g. Fotocopi surat keterangan telah magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan di Kantor Notaris selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
- h. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- i. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- j. Asli surat keterangan sehat rohani/jiwa dari psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- k. Asli surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris;
- l. Asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon bersedia menjadi pemegang protokol notaris lain, baik karena pindah, pensiun, meninggal dunia, menjabat sebagai pejabat negara, mengundurkan diri, atau diberhentikan sementara;
- n. Paspoto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar;
- o. Asli daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- p. Alamat surat menyurat, nomor telepon/telepon seluler/faksimili pemohon dan e-mail (jika ada); dan
- q. Prangko pos yang nilainya sesuai dengan biaya prangko pos pengiriman.

Kemudian tata cara pengangkatan notaris dijelaskan dalam Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

- (1) Permohonan untuk diangkat menjadi notaris diajukan oleh calon notaris secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos/jasa kurir kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut juga menjelaskan bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tersedia formasi, maka permohonan diproses dan surat keputusan pengangkatan notaris diterbitkan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pemohon dengan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagai notaris dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM juga menjelaskan bahwa:
 - (1) Sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
 - (2) Pelaksanaan sumpah jabatan notaris dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pengangkatan notaris.
 - (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan notaris, yang bersangkutan wajib:
 - a. Menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan ketentuan undang-undang jabatan notaris;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyampaikan potocopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) dan Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat); dan
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, dan teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, instansi di bidang pertanahan, organisasi notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), serta bupati atau walikota di tempat notaris diangkat.

Mengenai pemberhentian notaris dijelaskan dalam Pasal 20 Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani menjalankan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - e. Berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai dengan umur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan dan kondite notaris yang bersangkutan.
- (3) Perpanjangan masa jabatan notaris sampai dengan umur 67 (enam puluh tujuh) tahun diajukan dengan surat permohonan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan sehat berisi hasil pemeriksaan kesehatan fisik secara keseluruhan dan dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
 - b. Surat keterangan sehat rohani/jiwa dari dokter jiwa atau psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
 - c. Rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat; dan
 - d. Rekomendasi dari pengurus daerah, pengurus wilayah, dan pengurus pusat organisasi notaris.

Pada Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan pemberhentian sementara diucapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dan notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol dihadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pemberhentian sementara diterima.
- (3) Dalam hal serah terima protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris, Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan Notaris yang diberhentikan sementara kepada Menteri untuk diberhentikan dengan tidak hormat.
- (4) Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima kembali protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara notaris yang bersangkutan berakhir.
- (5) Dalam hal serah terima kembali protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris, Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Selanjutnya dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia dinyatakan bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Menteri dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dari jabatannya berdasarkan surat usulan dari Majelis Pengawas Pusat.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat usulan pemberhentian dengan tidak hormat dan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol, diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan.
- (3) Menteri memberhentikan notaris dengan tidak hormat dan menetapkan notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan tentang penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol beserta serah terima protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku juga terhadap pasal ini.

Dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

- (1) Menteri memberhentikan notaris dengan tidak hormat dari jabatannya dengan alasan:
 - a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat, dan jabatan notaris; dan/atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan notaris.
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas surat usulan Majelis Pengawas berdasarkan:
 - a. Laporan dari masyarakat;
 - b. Usulan dari organisasi notaris; atau
 - c. Inisiatif dari Majelis Pengawas.
 - (3) Laporan dan/atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan salinan resmi putusan/penetapan pengadilan dan/atau salinan resmi putusan Majelis Pengawas Pusat.
 - (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat usulan pemberhentian dengan tidak hormat dan penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol, diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan.
 - (5) Ketentuan tentang penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol beserta serah terima protokol sebagaimana dimaksud Pasal 32 berlaku juga terhadap pasal ini.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pengangkatan dan pemberhentian jabatan notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana digambarkan di atas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tugas dan Wewenang Notaris

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan foto copy dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Membuat akta risalah lelang.

Sedangkan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun.

Tugas dan wewenang PPAT adalah sebagai berikut:

1. Membuat dan mengurus akta-akta mengenai peralihan hak, seperti jual beli, hibah, tukar-menukar, pembagian hak bersama.
2. Membuat dan mengurus akta-akta tentang pembebanan hak, seperti SKMHT dan APHT.

Pembuatan akta PPAT dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memberi kesaksian mengenai:

1. Identitas penghadap dalam hal PPAT tidak mengenal penghadap secara pribadi.
2. Kehadiran para pihak atau kuasanya.
3. Kebenaran data fisik dan data yuridis obyek perbuatan hukum dalam hal obyek tersebut belum terdaftar.
4. Keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam perbuatan akta.
5. Telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan.

Dari tugas dan wewenang PPAT tersebut di atas dapat dilihat bahwa, PPAT mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengesahan dan pembuatan secara otentik peralihan hak, seperti jual beli, hibah, pembagian hak bersama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sebagainya, yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa hal yang merupakan larangan bagi notaris, yaitu:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Beberapa hal tersebut di atas merupakan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris, apabila hal tersebut kedapatan maka dapat dilakukan pencabutan izin sebagai notaris, karena sudah melanggar kode etik dan undang-undang yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan akta partij sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, tentunya notaris harus bisa memberikan penjelasan dan bertanggung jawab terhadap isi akta partij tersebut di hadapan penegak hukum apabila isi akta tersebut terjadi sengketa dan masuk ke ranah hukum. Akta partij yang disahkan oleh notaris bisa saja berupa keterangan palsu atau ada indikasi penipuan yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu notaris yang bersangkutan harus bisa memberikan penjelasan atau keterangan mengenai hal tersebut.
2. Setiap akta yang dikeluarkan atau disahkan oleh notaris tentunya mempunyai akibat hukum, demikian juga halnya dengan akta partij, yakni akta yang disahkan berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang menghadap kepada notaris, dan dimintakan untuk dibuat aktanya sebagai pegangan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, maka akibat hukum yang timbul dari akta partij, antara lain adalah akta partij mengikat kedua belah, kemudian akta partij bisa menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan akta partij juga bisa sebagai alat bukti dalam proses hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada notaris sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan akta berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, maka harus benar-benar berhati-hati dalam menilai atau menyeleksi penjelasan atau keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang menghadap untuk dibuatkan akta. Jangan sampai dikemudian hari akta yang dikeluarkan tersebut menjadi sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan, tentunya sebagai notaris harus terlibat dalam proses hukum yang ada hubungannya dengan akta tersebut
2. Kepada para pihak yang menghadap kepada notaris untuk dibuatkan akta terhadap sesuatu yang disepakati, maka kedua pihak atau pihak-pihak yang menghadap tersebut harus benar-benar mempunyai iktikad baik, bahwa keterangan yang diberikan tersebut tidak akan menjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu fakta yang disampaikan tersebut harus merupakan fakta yang sebenarnya yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Ikatan Notaris Indonesia, Medan 2007
- Herlina Suyati Bachtiar, *Seria Contoh Akta Notaris dan Akta di Bawah Tangan*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak Tanggungan*, Kencana, Jakarta, 2008
- Kasmirdan Jakfar, *Studi kelayakan Bisnis*, PT Prenada Media, Jakarta, 2003
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Rajawali Press, Jakarta, 2006
- _____, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta 1986



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

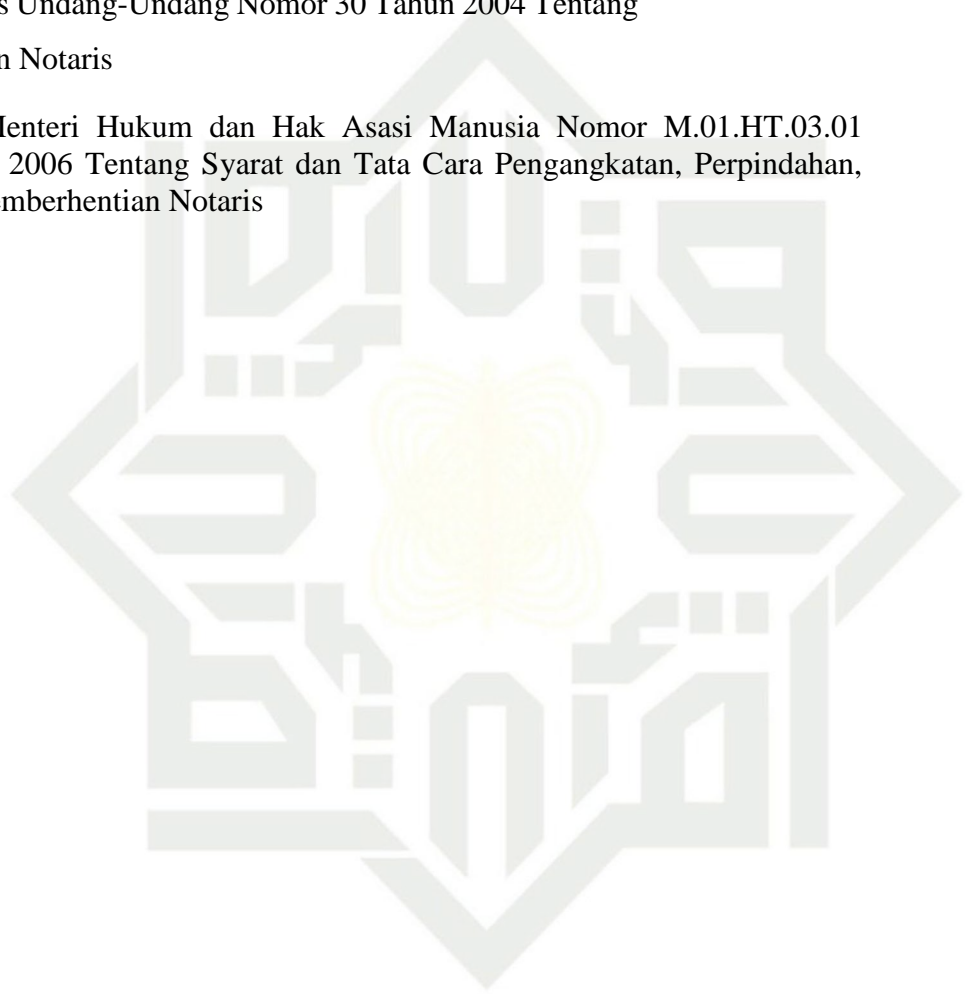
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006

Victor M. Situmorang dan Cormentina Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan
Notaris Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01
Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan,
dan Pemberhentian Notaris



UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PROFESI NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA PARTIJ MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS"**, yang ditulis oleh:

Nama : **FITRIANA ERICA**
NIM : **11427206188**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
Alpi Syarin, SH. MH

Penguji I
Dr. Abu Samah, SH. MH

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH. MH



Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : FITRIANA ERICA

NIM : 11427206188

Jurusan : ILMU HUKUM

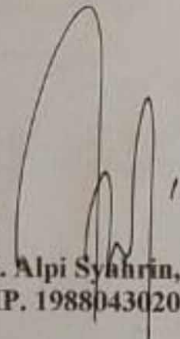
Judul : TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PROFESI NOTARIS
ATAS PEMBUATAN AKTA PARTIJ MENURUT UNDANG
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Pembimbing : Firdaus, SH.MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021

An. Pimpinan Redaksi


M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Fitriana Erica, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Februari 1996 dan merupakan anak Pertama dari dua bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Moh. Erdi dan Ibu Cartarina Yunus Putri. Pada tahun 2001-2002 penulis mulai belajar di TK Al-Mubarak, Joglo, Jakarta Barat. Tahun 2002-2004 Penulis melanjutkan sekolah di MI Al-Mubarak, Joglo, Jakarta Barat, dan di Tahun 2004-2008 penulis menyelesaikan sekolah di MI Mazro'atul Ulum, Ciledug Kota Tangerang Banten. Mulai dari Tahun 2008-2011 penulis melanjutkan SMP di SMP N 1 Rao Selatan, Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, dan menyelesaikan SLTA di SMA N 1 Rao, Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. Dengan restu Allah dan Orang tua, penulis melanjutkan Jenjang Pendidikan Strata-1 (S1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada jurusan Ilmu Hukum. Selama menjadi mahasiswa, penulis melakukan magang di Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau, tepatnya di ruangan Juru Sita. Atas Izin Allah dan restu Orang Tua serta doa dari Orang-orang tercinta, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Profesi Notaris Atas Pembuatan Akta Partij Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris" di bawah bimbingan Bapak Firdaus, SH.MH, berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada tanggal 28 Juli 2021, penulis dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH). Alhamdulillah, Barokallah.